



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 188.45-456/2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 188.45-397/2024
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH
KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2025

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya penambahan usulan rancangan Peraturan Wali Kota yang diajukan oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, perlu melakukan penyesuaian terhadap Lampiran Keputusan Wali Kota Nomor 188.45-397/2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah (Propemperkada) Kota Balikpapan Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Wali Kota Nomor 188.45-242/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Nomor 188.45-397/2024 tentang Propemperkada Kota Balikpapan Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Wali Kota Nomor 188.45-397/2024 tentang Propemperkada Kota Balikpapan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Wali Kota Nomor 188.45-397/2024 tentang Propemperkada Kota Balikpapan Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Wali Kota Nomor 188.45-242/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Nomor 188.45-397/2024 tentang Propemperkada Kota Balikpapan Tahun 2025, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 24 Desember 2025

WALI KOTA BALIKPAPAN,

RAHMAD MAS'UD

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Sekretaris Daerah Kota Balikpapan;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Balikpapan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 188.45-456/2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR
188.45-397/2024 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN KEPALA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN
2025

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH TAHUN 2025

NO	JUDUL	STATUS			PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA
		MATERI POKOK	BARU	PENYEMPURNAAN	
1	PEDOMAN PENYELENGGARAAN KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH	KOPERASI	√		DKUMKMP
2	KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	PENYEDIAAN AIR MINUM	√		DPU
3	POLA KARIER BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL	KEPEGAWAIAN	√		BKPSDM
4	RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026	RENCANA KERJA	√		BAPPEDA LITBANG
5	PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025	RENCANA KERJA	√		BAPPEDA LITBANG
6	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026	RENCANA KERJA	√		BAPPEDA LITBANG
7	INOVASI DAERAH	INOVASI	√		BAPPEDA LITBANG
8	TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN	TANGGUNG JAWAB SOSIAL	√		BAPPEDA LITBANG
9	PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING	STUNTING	√		BAPPEDA LITBANG
10	PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS	DISABILITAS	√		BAPPEDA LITBANG
11	PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG MEKANISME PENGADAAN PENGELOLAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH	CADANGAN PANGAN		√	DP3
12	POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT	BLUD	√		DINKES
13	PEDOMAN SITEPLAN	SITEPLAN	√		DISPERKIM
14	PEDOMAN PENUGASAN INVESTIGASI	PEDOMAN INVESTIGASI	√		INSPEKTORAT
15	TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	TUNJANGAN HARI RAYA	√		BKAD
16	PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 35 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	APBD		√	BKAD
17	STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026	STANDAR SATUAN HARGA	√		BKAD
18	PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024	APBD	√		BKAD
19	PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	APBD	√		BKAD
20	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI	APBD		√	BKAD
21	SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	KEUANGAN DAERAH	√		BKAD
22	PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA PEMANTAUAN DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA	BELANJA TIDAK TERDUGA		√	BKAD
23	PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN PENERIMAAN/SINERGI PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	PAJAK	√		BPPDRD

NO	JUDUL	STATUS			PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA
		MATERI POKOK	BARU	PENYEMPURNAAN	
24	PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN	BPHTB	√		BPPDRD
25	PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI	RETRIBUSI	√		BPPDRD
26	SISTEM KERJA	SISTEM KERJA	√		BKPSDM
27	PEDOMAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH	HUKUMAN DISIPLIN	√		BKPSDM
28	TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN	TAMBAHAN PENGHASILAN	√		BKPSDM
29	PELIMPAHAN KEWENANGAN MANDAT DAN DELEGASI PENANDATANGANAN NASKAH DINAS KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN	PELIMPAHAN KEWENANGAN	√		BKPSDM
30	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH	ORGANISASI DAN TATA KERJA	√		BAGIAN ORGANISASI
31	PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA	RUKUN TETANGGA	√		BAGIAN PEMERINTAHAN
32	PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM	BANTUAN HUKUM	√		BAGIAN HUKUM
33	PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 32 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BALIKPAPAN	SUSUNAN ORGANISASI		√	DISDIKBUD
34	SISTEM PEMBELAJARAN TERINTEGRASI (CORPORATE UNIVERSITY) DALAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH	KEPEGAWAIAN	√		BKPSDM
35	PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PENUNTASAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN PRASEKOLAH DASAR	PENDIDIKAN		√	DISDIKBUD
36	TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA	LINGKUNGAN HIDUP	√		DLH
37	KONTRAK KERJA INDIVIDU	KONTRAK KERJA INDIVIDU	√		DISDIKBUD
38	PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN	JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN		√	DISNAKER
39	PEDOMAN ALIH MEDIA ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH	ARSIP	√		DISPUSTAKAR
40	PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP TERJAGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH	ARSIP	√		DISPUSTAKAR

WALI KOTA BALIKPAPAN,

RAHMAD MAS'UD